

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana kerja Tahun 2022 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan penyusunannya secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Namun kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya, kepada kita semua. Amin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	10
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	25
3.3 Program dan Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	38
Bab V PENUTUP	42

BAB I

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visidan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh

pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang).

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 3708 tahun 2020 Tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.
33. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 188/ /416-050/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026.

13 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2022.

14 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kejadian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan, isu-isu penting penyelenggaraan, tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target, kinerja Renstra OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang usulan Rencana Kerja dan pendanaan OPD pada APBD tahun 2021. Disini terdapat program kegiatan yang sudah dianggarkan di Program dan kegiatan kinerja Renstra OPD Tahun 2021-2026.

BAB V PENUTUP

Berisikan urusan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

21. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD pada Tahun 2020 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Mojokerto. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2020 Per Semester II Tahun 2020 adalah:

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Pencapaian kinerja prgram pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Sewkretariat DPRD Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan

Kegiatan :

- a) Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah 33,18%
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/oprasional. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 44,18%
- c) Penyediaan Alat Tulis Kantor Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 89,95%
- d) Penyediaan barang cetak dan penggandaan. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 97,42%
- e) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 37,23%
- f) Penyediaan Makanan dan minuman. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 99,95%

- g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 90%
- h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 99,98%
- i) Penyediaan jasa tenaga kerja. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 96,31%

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Ruin/ Berkala Gedung kantor, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ operasional, dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor.

Kegiatan :

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah sebesar 100%.
- b) Pemeliharaan Ruin/ Berkala Gedung kantor. Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah sebesar 97,90%.
- c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ operasional. Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah sebesar 96,03%
- d) Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor. Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah sebesar 59,66%

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Pencapaian kinerja program ini adalah persentase dokumen ASN yang mengikuti workshop sesuai tupoksi.

Kegiatan :

Workshop Rapat-rapat Koordinasi Sekretariat DPRD. Kinerja Kegiatan ini adalah sebesar 93,99 %

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Pencapaian kinerja program ini adalah persentase dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan kinerja organisasi yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan:

Penyusunan rencana tahunan dan pelaporan kinerja tahunan. Kinerja Kegiatan ini adalah sebesar 100 %

5. PROGRAM PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD

Pencapaian kinerja program ini adalah Prosentase Perda yang disyahkan dan Persentase pemenuhan Kebutuhan DPRD sesuai Peraturan.

Kegiatan :

- a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 99,79%
- b) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 99,59%
- c) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggta DPRD. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 98,48%
- d) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD ke dalam dan luar daerah. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 99,55%
- e) Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 92,77%
- f) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 71,96%
- g) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 88,87 %
- h) Rapat-rapat Paripurna. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 59,72%
- i) Kegiatan reses. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 83,90%
- j) Peringatan hari jadi Kabupaten Mojokerto. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 100 %
- k) Pidato Kenegaraan. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 89,32%
- l) General Cek Up bagi pimpinan dan Anggota DPRD. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 0%
- m) Peningkatan kerjasama infrmasi dengan mass media. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 97,50%

Secara umum capaian kinerja dari 28 (dua puluh delapan) kegiatan di atas rata-rata adalah hampir mencapai 93,69%. Selanjutnya pencapaian Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada Tabel TC-29.

Tabel.1.1. (T C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Rensra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020	Tingkat Realisasi 2020		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (n-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, air Bersih dan Listrik	60	36	12	12	100%	12	60	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peizinan kendaraan Dinas/ Oprasional	Jumlah kendaraan operasional,perpajakan STNK,Pajak Kendaraan dan KIR	60	38	12	12	100%	12	62	103%
	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat tulis kantor	12	9	3	3	100%	2	14	117%

	dan prasarana Aparatur									
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah waktu pemeliharaan Gedung Kantor sampai berfungsi baik	60	36	12	12	100%	12	60	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional	Jumlah waktu pemeliharaan Kendaraan dinas/ operasional	60	36	12	12	100%	12	60	100%
	pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah waktu pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	60	36	12	12	100%	12	60	100%
	Pengendara an Kendaraan Oprasional Roda 2	Jumlah kendaraan oprasional roda 2 yg tersedia	-	-	-	-	0%	-	-	0%
	Program peningkatan disiplin aparatur							-		
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya (sekretariat)	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia bagi ASN	150	90	30	-	0%	30	120	80%
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia bagi ASN	150	90	30	-	0%	30	120	80%

	Program Peningkatan Tata Kelola Kesekretariatan							-	-	
	Workshop Rapat-rapat Koordinasi Sekretariat DPRD	Jumlah workshop ASDEKSI yang diikuti ASN sesuai Tupoksi	35	20	7	7	100%	7	34	97%
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya (DPRD)	Jumlah DPRD yang mendapat Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	150	100	50	-	0%	50	150	100%
	hearing/konsultasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah hearing/konsultasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama serta pengamanan	40	24	8	8	100%	8	40	100%
	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	125	74	25	22	88%	22	118	94%
	Rapat-rapat paripurna	Jumlah Rapat-rapat paripurna	180	98	36	30	83%	36	164	91%
	Kegiatan reses	Jumlah aspirasi masyarakat (Jumlah Kegiatan Reses)	15	8	3	3	100%	2	13	87%

	Penyusunan Rencana Tahunan dan laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan laporan kinerja yang akuntable	20	12	4	4	100%	4	20	100%
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah							-		
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	75	55	15	14	93%	15	84	112%
	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kunjuran Pimpinan dan Anggota DPRD	60	40	14	14	100%	14	68	113%
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek Kapasitas DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya	20	12	6	6	100%	4	22	110%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD ke Luar dan Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam dan Luar Daerah	60	40	14	14	100%	14	68	113%
	Penyusunan Raperda Bidang Komisi I	Jumlah NA RancanganPerda Bidang Komisi I	5	3	1	-	0%	1	4	80%

	Penyusunan Raperda Bidang Komisi II	Jumlah NA RancanganPerda Bidang Komisi II	5	3	1	-	0%	1	4	80%
	Penyusunan Raperda Bidang Komisi III	Jumlah NA RancanganPerda Bidang Komisi III	5	3	1	-	0%	1	4	80%
	Penyusunan Raperda Bidang Komisi IV	Jumlah NA RancanganPerda Bidang Komisi IV	5	3	1	-	0%	1	4	80%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan sidang-sidang serta mengelola urusan dalam dan keuangan DPRD juga penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel TC 30

Tabel 1.2. (T-C 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2017 (thn n-3)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-3)	tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021 (thn n+1)	(thn	
		4	5	6	7		8	9	10		11	12		13
	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Kesekretariatan DPRD					64%	70%	0%	64.14%	65.04%	65.53%	70%		
	Persentase Perda yang disahkan					80%	85%	80%	80%		80%	85%		
	Persentase pemenuhan hak DPRD sesuai peraturan					80%	85%	80%	80%		80%	85%		
	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi.						60%					60%		
	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi						90%					90%		
	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi						80%					80%		
	Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan						90%					90		

Sebagaimana Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 bahwa di Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto menetapkan besaran Indikator Kinerja Utama yaitu IKM DPRD sebesar 65.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja oleh tim akademisi melalui metode survey dan wawancara kepada anggota DPRD di semester I dan Semester II, maka diperoleh hasil survey nilai indeks kepuasan DPRD di akhir tahun 2020 dengan nilai realisasi kinerja sebesar 65,53 % atau mencapai 100,81% atau kategori BAIK.

Perolehan angka indeks tersebut dihitung berdasarkan ketentuan unsur- unsur pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik dengan mempertimbangkan unsur pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi digabung maka unsur pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto di Tahun 2020 mempunyai nilai kinerja sebesar 65,53.

Dari capaian kinerja tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD di tahun 2020 yaitu sebesar 65 telah terpenuhi dan bahkan memperoleh capaian kinerja melebihi target sebesar 0,53 atau presentase capaian melebihi target sebesar 0,81%.

Untuk lebih detailnya, capaian kinerja sebesar 81,05 dengan unsur pelayanan mempertimbangkan TUPOKSI dapat diuraikan sebagai berikut :

Nilai rata-rata FASILITAS UMUM 50,08 dengan interpretasi Fasilitas Umum perlu ditingkatkan.

- a. Nilai rata-rata FASILITAS RUANG RAPAT 54,33 dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- b. Nilai rata-rata FASILITAS RUANG KERJA/ FRAKSI sebesar 53 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- c. Nilai rata-rata FASILITAS MAKANAN DAN MINUMAN sebesar 50,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- d. Nilai rata-rata FASILITAS ANGGARAN sebesar 56,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- e. Nilai rata-rata FASILITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) sebesar 54,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- f. Nilai rata-rata FASILITAS PERSONAL sebesar 52,33 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- g. Nilai rata-rata FASILITAS KEGIATAN sebesar 50,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- h. Nilai rata-rata FASILITAS INFORMASI sebesar 49,33 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.

Dari Nilai rata-rata persepsi yang diperoleh dari 4 (Empat) bagian di Sekretariat DPRD dapat diketahui bahwa 4 (empat) bagian tersebut telah melampaui capaian kinerjanya, tetapi diharapkan Bagian-bagian tersebut lebih dapat meningkatkan layanannya kepada segenap anggota DPRD.

Dan apabila ke 9 (sembilan) angka indeks tersebut diatas diakumulasikan ke dalam angka IKM, maka diperoleh angka 65,53.

Di Tahun 2022, berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020, program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yaitu :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota;

Diharapkan ditahun 2022 Program Utama dan Program Penunjang menjadi lebih baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya melalui

APBD sehingga dapat lebih menformulasikan visi dan misi kepala daerah lebih harmoni, sinergi dan terukur di setiap kinerjanya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto maka untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya sebagai Badan Legislatif Daerah yang mencerminkan makna strategis dan mencerminkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Mojokerto, maka dalam upaya untuk mendukung tugas organisasi tersebut Sekretariat DPRD merumuskan Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan sebagai landasan atau dasar dalam acuan kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi DPRD;
- c. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2022 adalah sebagaimana tabel TC 31

Review terhadap rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan proses membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (riil) dalam Renja SKPD.

Berkaitan hal tersebut, maka hasil proses membandingkan antara rancangan akhir RKPD Kabupaten Mojokerto dengan Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto telah sesuai.

Tabel 2.1 (TC.31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	MOJOKERTO	Persentase Penyerapan Anggaran	90%	49.619.273.607	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	MOJOKERTO	Nilai SAKIP	76,18 (BB)	49.619.273.607	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	6 dokumen	30.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Persentase indikator program PD yang tercapai sesuai target	100 %	30.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Tersusun	2 dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Tersusun	2 dokumen	15.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Evaluasi	4 dokumen	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen Evaluasi	4 dokumen	15.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah waktu Administrasi Keuangan Perangkat	14 bln	4.291.067.815	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	MOJOKERTO	Presentase realisasi anggaran perangkat	82%	4.291.067.815	

			Daerah tersedia					daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	MOJOKERTO	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	4.291.067.815	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	MOJOKERTO	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	4.291.067.815	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terpenuhi	30 stel 7 kegiatan	700.000.000	Adminis trasi Kepega waian Perangk at Daerah	MOJOK ERT O	IP ASN	80	700.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	MOJOKERTO	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang Terpenuhi	30 stel	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	MOJOKERTO	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang Terpenuhi	30 stel	100.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Workshop ASDEKSI yang Diikuti ASN sesuai Tupoksi	7 kegiatan	600.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	MOJOKERTO	Jumlah Workshop ASDEKSI yang Diikuti ASN sesuai Tupoksi	7 kegiatan	600.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MOJ OKER TO	jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah terpenuhi	8 paket 12 bulan	3.309.664.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MOJOK ERT O	Presenta se penyedia an adminis trasi umum perangk at daerah sesuai kebutuha n	100%	3.309.664.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 paket	2.000.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MOJOKERTO	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 paket	2.000.000.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	MOJO KERT O	Jumlah Paket pengadaan Alat Tulis Kantor	1 paket	99.664.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	MOJOK ERTO	Jumlah Paket pengadaan Alat Tulis Kantor	1 paket	99.664.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	MOJOK ERTO	Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	200.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	MOJO KERT O	Jumlah Paket Pengadaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	MOJOK ERTO	Jumlah Paket Pengadaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 paket	10.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah waktu Fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	600.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	MOJOK ERTO	Jumlah waktu Fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	600.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MOJO KERT O	Jumlah Waktu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	12 bulan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MOJOK ERTO	Jumlah Waktu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	12 bulan	400.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.500.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MOJOK ERTO	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	81 %	2.500.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MOJO KERT	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik	12 bulan	600.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	MOJOK ERTO	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 bulan	600.000.000	

		O				Air dan Listrik		Air Bersih dan Listrik			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik	12 bulan	1.900.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MOJOK ERT0	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik	12 bulan	1.900.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MOJOK ERT0	jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	24 unit 12 bln	1.358.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MOJOK ERT0	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	81 %	1.358.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24 unit	600.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MOJOK ERT0	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24 unit	600.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MOJOK ERT0	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik (Penyediaan Jasa kebersihan Kantor) dan Peralatan Kerja yang Terpelihara	12 bulan	358.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MOJOK ERT0	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik (Penyediaan Jasa kebersihan Kantor) dan Peralatan Kerja yang Terpelihara	12 bulan	358.000.000	

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik	12 bulan	400.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	MOJOKERTO	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik	12 bulan	400.000.000	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	MOJOKERTO	jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14 bulan, 150 stel, 50 org		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	MOJOKERTO	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi	90 %	35.430.541.792	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14 bulan	35.845.541.792	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14 bulan	35.845.541.792	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Pakaian Dinas sesuai Ketentuan yang Tersedia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	150 stel	400.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Pakaian Dinas sesuai Ketentuan yang Tersedia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	150 stel	400.000.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapat Pelayanan General Check Up	50 orang	185.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapat Pelayanan General Check Up	50 orang	185.000.000	
	Layanan Administrasi DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Waktu Layanan Administrasi DPRD	12 bln	1.000.000.000	Layanan Administrasi DPRD	MOJOKERTO	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi	100%	1.000.000.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Waktu Fasilitasi Rapat DPRD	12 bulan	1.000.000.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Waktu Fasilitas i Rapat DPRD	12 bulan	1.000.000.000	

	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	MOJOKERTO		10 dokumen	40.405.630.000	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	MOJOKERTO		10 dokumen	40.405.630.000	
			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	60%	7.220.272.000			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	60%	7.220.272.000	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	10 dokumen	7.220.272.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	MOJOKERTO	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	60%	7.220.272.000	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Program Rancangan Perda yang Dibahas	2 dokumen	900.000.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Program Rancangan Perda yang Dibahas	2 dokumen	900.000.000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Raperda yang Dibahas	4 dokumen	4.000.000.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Raperda yang Dibahas	4 dokumen	4.000.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Naskah Akademik yang Disusun	4 dokumen	2.320.272.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Naskah Akademik yang Disusun	4 dokumen	2.320.272.000	
			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi	90%	5.838.788.000			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang	90%	5.838.788.000	

								terfasilitasi			
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran dibahas	6 dokumen	5.838.788.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	MOJOKERTO	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas	90%	5.838.788.000	
	Pembahasan KUA dan PPAS	MOJOKERTO	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang dibahas	1 dokumen	1.118.408.000	Pembahasan KUA dan PPAS	MOJOKERTO	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang dibahas	1 dokumen	1.118.408.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang dibahas	1 dokumen	1.118.024.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang dibahas	1 dokumen	1.118.024.000	
	Pembahasan APBD	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen APBD yang Dibahas	1 dokumen	1.118.408.000	Pembahasan APBD	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen APBD yang Dibahas	1 dokumen	1.118.408.000	
	Pembahasan APBD Perubahan	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang Dibahas	1 dokumen	1.118.024.000	Pembahasan APBD Perubahan	MOJOKERTO	Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang Dibahas	1 dokumen	1.118.024.000	
	Pembahasan Laporan Semester	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Laporan APBD yang Dibahas per Semester	1 dokumen	247.900.000	Pembahasan Laporan Semester	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Laporan APBD yang Dibahas per Semester	1 dokumen	247.900.000	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD yang Dibahas	1 dokumen	1.118.024.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD yang Dibahas	1 dokumen	1.118.024.000	

			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi	80%	8.168.024.000			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi	80%	8.168.024.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	MOJOKERTO	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi	288 kegiatan/ 2 dokumen	8.168.024.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	MOJOKERTO	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi	80%	8.168.024.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	MOJOKERTO	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan dan Produk Hukum yang Diawasi	48 kegiatan	1.500.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	MOJOKERTO	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan dan Produk Hukum yang Diawasi	48 kegiatan	1.500.000.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	MOJOKERTO	Jumlah Kegiatan Urusan Bidang Infrastruktur yang Diawasi	48 kegiatan	800.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	MOJOKERTO	Jumlah Kegiatan Urusan Bidang Infrastruktur yang Diawasi	48 kegiatan	800.000.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	MOJOKERTO	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diawasi	48 kegiatan	1.500.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	MOJOKERTO	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diawasi	48 kegiatan	1.500.000.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	MOJOKERTO	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang Diawasi	48 kegiatan	750.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	MOJOKERTO	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang Diawasi	48 kegiatan	750.000.000	

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	MOJO KERT O	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang Diawasi	48 kegiatan	800.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	MOJOK ERTO	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang Diawasi	48 kegiatan	800.000.000	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	MOJO KERT O	Jumlah dokumen Temuan BPK dan Rekomendasi BPK yang Diawasi	1 dokumen	400.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	MOJOK ERTO	Jumlah dokumen Temuan BPK dan Rekomendasi BPK yang Diawasi	1 dokumen	400.000.000	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	MOJO KERT O	Jumlah Kegiatan atau Proyek APBD yang Diawasi	48 kegiatan	1.300.000.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	MOJOK ERTO	Jumlah Kegiatan atau Proyek APBD yang Diawasi	48 kegiatan	1.300.000.000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	MOJO KERT O	Jumlah Laporan LKPJ yang Dibahas	1 dokumen	1.118.024.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	MOJOK ERTO	Jumlah Laporan LKPJ yang Dibahas	1 dokumen	1.118.024.000	
			Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan	90%	19.178.546.000			Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan	90%	19.178.546.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	MOJ OKER TO	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	6 keg, 12 bln, 10 pakar, 70 tenaga ahli, 1 dokumen	5.175.000.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	MOJOK ERTO	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	90%	5.175.000.000	
	Bimbingan		Jumlah Bimbingan Teknis Pimpinan	6 kegiatan	3.000.000.000	Bimbingan Teknis		Jumlah Bimbingan	6 kegiatan	3.000.000.000	

	Teknis DPRD	MOJO KERT O	dan Anggota DPRD yang Dilaksanakan			DPRD	MOJOK ERTO	Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD yang Dilaksana n			
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	MOJO KERT O	Jumlah Waktu Publikasi dan Dokumentasi yang Diterbitkan	12 bulan	700.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	MOJOK ERTO	Jumlah Waktu Publikasi dan Dokumentasi yang Diterbitkan	12 bulan	700.000.000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	MOJO KERT O	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Disediakan	10 Orang	100.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	MOJOK ERTO	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Disediakan	10 Orang	100.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	MOJO KERT O	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang Disediakan	70 orang	175.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	MOJOK ERTO	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang Disediakan	70 orang	175.000.000	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	MOJO KERT O	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang Disusun	1 dokumen	1.200.000.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	MOJOK ERTO	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang Disusun	1 dokumen	1.200.000.000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	MOJ OKER TO	Jumlah kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi	1 dokumen, 3 kegiatan	2.720.750.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	MOJOK ERTO	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpun an Aspirasi Masyarakat terfasilitasi	100%	2.720.750.000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	MOJO KERT O	Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	1 dokumen	50.000.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	MOJOK ERTO	Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	1 dokumen	50.000.000	
	Pelaksanaan Reses	MOJO KERT O	Jumlah kegiatan reses terseda	3 kegiatan	2.670.750.000	Pelaksana an Reses	MOJOK ERTO	Jumlah kegiatan reses terseda	3 kegiatan	2.670.750.000	

	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	MOJO KERTO	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi	48 kegiatan	654.800.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	MOJOKERTO	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi	80%	654.800.000	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	MOJO KERTO	Jumlah pengawasan Kode Etik DPRD	48 Kegiatan	654.800.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	MOJOKERTO	Jumlah pengawasan Kode Etik DPRD	48 Kegiatan	654.800.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Tugas DPRD terfasilitasi	144 keg, 1 dokumen	10.627.996.000	Fasilitasi Tugas DPRD	MOJOKERTO	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi	80%	10.627.996.000	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	MOJO KERTO	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD terfasilitasi	48 Kegiatan	5.000.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD terfasilitasi	48 Kegiatan	5.000.000.000	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	MOJO KERTO	Jumlah dokumen Laporan Kinerja DPRD yang Tersusun	1 dokumen	1.118.024.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	MOJOKERTO	Jumlah dokumen Laporan Kinerja DPRD yang Tersusun	1 dokumen	1.118.024.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	MOJO KERTO	Jumlah Pelaksanaan Tugas Banmus yang Terfasilitasi	48 kegiatan	1.800.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	MOJOKERTO	Jumlah Pelaksanaan Tugas Banmus yang Terfasilitasi	48 kegiatan	1.800.000.000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	MOJO KERTO	Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Terfasilitasi	48 kegiatan	2.709.972.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	MOJOKERTO	Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Terfasilitasi	48 kegiatan	2.709.972.000	

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Merupakan deskripsi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten kota yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sehubungan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tidak melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dimaksud dikarenakan tidak adanya keterkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tabel 2.2. (TC 32) Usulan Program dan Kegiatan dari Kepentingan tahun 2022
Kabupaten Mojokerto

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATAN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Perpres Nomor 27 tahun 2015 tentang sekretariat Jendral DPRD RI dan badan Keahlian DPR RI. Sekretariat jendral DPR RI adalah unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan yang tugasnya memberikan bantuan teknis, Administratif dan bantuan keahlian.

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan sidang-sidang serta mengelola urusan dalam dan keuangan DPRD juga penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi kepala daerah dengan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam perubahan RPJMD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tetap menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : **“Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal”**.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang

akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka Sekretariat DPRD tidak mengubah sasaran Perangkat Daerah dan tetap menetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

“Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD”.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2021	Target 2022
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik		IKM	70	71
		Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Revormasi Birokrasi Perangkat Daerah	60	60
		Meningkatnya Kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	60	60
			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi	90	90
			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi	80	80
			Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan	90	90

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
- b. Adapun program-program di tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut

Program Utama :

- 1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;

Dari program tahun 2022 tersebut diatas diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

- 1.1 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - 1.1.1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - 1.1.2 Pembahasan Rancangan Perda
 - 1.1.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - 1.1.4 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
- 1.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 1.2.1 Pembahasan KUA dan PPAS
 - 1.2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 1.2.3 Pembahasan APBD
 - 1.2.4 Pembahasan Perubahan APBD
 - 1.2.5 Pembahasan Laporan Semester
 - 1.2.6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 1.3 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 1.3.1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 1.3.2 Pelaksanaan Reses
- 1.4 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 1.4.1 Pengawasan Kode Etik DPRD
- 1.5 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1.5.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- 1.5.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- 1.5.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 1.5.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- 1.5.5 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
- 1.5.6 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 1.5.7 Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 1.5.8 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 1.6 Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 1.6.1 Pendalaman Tugas DPRD
 - 1.6.2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 1.6.3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 1.6.4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - 1.6.5 Penyusunan Program Kerja DPRD
- 1.7 Fasilitasi Tugas DPRD
 - 1.7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPR
 - 1.7.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - 1.7.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - 1.7.4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
 - 2.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 2.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 2.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material
 - 2.4.5 Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 2.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 2.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 2.7 Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD
 - 2.7.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 2.7.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - 2.7.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 2.8 Layanan Administrasi DPRD
 - 2.8.1 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Sedangkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 sebagaimana perubahan RPJMD dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 tertuang dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Perkiraan Maju Tahun 2023

OPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP	Setwan	76,18 (BB)	49.619.273.607	APBD		77,48(BB)	53.092.622.759
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	Setwan	6 dokumen	30.000.000	APBD		6 dokumen	33.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Tersusun	Setwan	2 dokumen	15.000.000	APBD		2 dokumen	16.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Setwan	4 dokumen	15.000.000	APBD		4 dokumen	16.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah	Setwan	90%	4.291.067.815	APBD		90%	4.720.174.597
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Setwan	14 bulan	4.291.067.815	APBD		14 bulan	4.720.174.597
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN	Setwan	80	700.000.000	APBD		80	770.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang Terpenuhi	Setwan	30 stel	100.000.000	APBD		30 stel	110.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Workshop ASDEKSI yang Diikuti ASN sesuai Tupoksi	Setwan	7 kegiatan	600.000.000	APBD		7 kegiatan	660.000.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	Setwan	80%	3.309.664.000	APB D		80%	3.640.330.400
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setwan	5 paket	2.000.000.000	APB D		5 paket	2.200.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket pengadaan Alat Tulis Kantor	Setwan	1 paket	99.664.000	APB D		1 paket	109.330.400
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Setwan	1 paket	200.000.000	APB D		1 paket	220.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pengadaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Setwan	1 paket	10.000.000	APB D		1 paket	11.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu Fasilitasi kunjungan tamu	Setwan	12 bulan	600.000.000	APB D		12 bulan	660.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Setwan	12 bulan	400.000.000	APBD		12 bulan	440.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Setwan	100 %	2.500.000.000	APB D		100 %	2.750.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik	Setwan	12 bulan	600.000.000	APB D		12 bulan	660.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik	Setwan	12 bulan	1.900.000.000	APB D		12 bulan	2.090.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Setwan	100 %	1.358.000.000	APB D		100 %	1.493.800.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setwan	24 unit	600.000.000	APB D		24 unit	660.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik (Penyediaan Jasa kebersihan Kantor) dan Peralatan Kerja yang Terpelihara	Setwan	12 bulan	358.000.000	APB D		12 bulan	393.800.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik	Setwan	12 bulan	400.000.000	APB D		12 bulan	440.000.000
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Setwan	14 bulan	14 bulan, 150 stel, 50 org	APB D		14 bulan	43.234.024.100
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Setwan	14 bulan	35.845.541.792	APB D		14 bulan	37.941.817.762
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas sesuai Ketentuan yang Tersedia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Setwan	150 stel	400.000.000	APB D		150 stel	440.000.000
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapat Pelayanan General Check Up	Setwan	50 orang	185.000.000	APB D		50 orang	203.500.000
	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Waktu Layanan Administrasi DPRD	Setwan	12 bln	1.000.000.000	APB D		12 bln	1.100.000.000
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Waktu Fasilitasi Rapat DPRD	Setwan	12 bulan	1.000.000.000	APB D		12 bulan	1.100.000.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			10 dokumen	40.405.630.000			10 dokumen	43.234.024.100
		Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan		60%	7.220.272.000			60%	7.350.000.000

		Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi							
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	Setwan	10 dokumen	7.220.272.000	APB D		10 dokumen	7.350.000.000
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen Program Rancangan Perda yang Dibahas	Setwan	2 dokumen	900.000.000	APB D		2 dokumen	1.000.000.000
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen Raperda yang Dibahas	Setwan	4 dokumen	4.000.000.000	APB D		4 dokumen	4.050.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah dokumen Naskah Akademik yang Disusun	Setwan	4 dokumen	2.320.272.000	APB D		4 dokumen	2.300.000.000
		Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi		90%	5.838.788.000			90%	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran dibahas	Setwan	6 dokumen	5.838.788.000	APB D		6 dokumen	6.250.000.000
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang dibahas	Setwan	1 dokumen	1.118.408.000	APB D		1 dokumen	1.200.000.000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang dibahas	Setwan	1 dokumen	1.118.024.000	APB D		1 dokumen	1.200.000.000
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD yang Dibahas	Setwan	1 dokumen	1.118.408.000	APB D		1 dokumen	1.200.000.000
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang Dibahas	Setwan	1 dokumen	1.118.024.000	APB D		1 dokumen	1.200.000.000
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen Laporan APBD yang Dibahas per Semester	Setwan	1 dokumen	247.900.000	APB D		1 dokumen	250.000.000

	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD yang Dibahas	Setwan	1 dokumen	1.118.024.000	APB D		1 dokumen	1.200.000.000
		Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi		80%	8.168.024.000			80%	8.760.000.000
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi	Setwan	288 kegiatan/ 2 dokumen	8.168.024.000	APB D		288 kegiatan / 2 dokumen	8.760.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan dan Produk Hukum yang Diawasi	Setwan	48 kegiatan	1.500.000.000	APB D		48 kegiatan	1.600.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Kegiatan Urusan Bidang Infrastruktur yang Diawasi	Setwan	48 kegiatan	800.000.000	APB D		48 kegiatan	860.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diawasi	Setwan	48 kegiatan	1.500.000.000	APB D		48 kegiatan	1.600.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang Diawasi	Setwan	48 kegiatan	750.000.000	APB D		48 kegiatan	800.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang Diawasi	Setwan	48 kegiatan	800.000.000	APB D		48 kegiatan	850.000.000
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen Temuan BPK dan Rekomendasi BPK yang Diawasi	Setwan	1 dokumen	400.000.000	APB D		1 dokumen	450.000.000
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Kegiatan atau Proyek APBD yang Diawasi	Setwan	48 kegiatan	1.300.000.000	APB D		48 kegiatan	1.400.000.000

	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan LKPJ yang Dibahas	Setwan	1 dokumen	1.118.024.000	APB D		1 dokumen	1.200.000.000
		Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan		90%	19.178.546.000			90%	20.874.024.100
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	Setwan	6 keg, 12 bln, 10 pakar, 70 tenaga ahli, 1 dokumen	5.175.000.000	APB D		6 keg, 12 bln, 10 pakar, 70 tenaga ahli, 1 dokumen	5.860.000.000
	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD yang Dilaksanakan	Setwan	6 kegiatan	3.000.000.000	APB D		6 kegiatan	3.500.000.000
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Waktu Publikasi dan Dokumentasi yang Diterbitkan	Setwan	12 bulan	700.000.000	APB D		12 bulan	750.000.000
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Disediakan	Setwan	10 Orang	100.000.000	APB D		10 Orang	110.000.000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang Disediakan	Setwan	70 orang	175.000.000	APB D		70 orang	200.000.000
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang Disusun	Setwan	1 dokumen	1.200.000.000	APB D		1 dokumen	1.300.000.000
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi	Setwan	1 dokumen, 3 kegiatan	.720.750.000	APB D		1 dokumen, 3 kegiatan	2.755.000.000
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	Setwan	1 dokumen	50.000.000	APB D		1 dokumen	55.000.000
	Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses terseda	Setwan	3 kegiatan	2.670.750.000	APB D		3 kegiatan	2.700.000.000
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi	Setwan	48 kegiatan	654.800.000	APB D		48 kegiatan	700.000.000
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah pengawasan Kode Etik DPRD	Setwan	48 Kegiatan	654.800.000	APB D		48 Kegiatan	700.000.000

	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Tugas DPRD terfasilitasi	Setwan	144 keg, 1 dokumen	10.627.996.000	APB D		144 keg, 1 dokumen	11.559.024.100
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD terfasilitasi	Setwan	48 Kegiatan	5.000.000.000	APB D		48 Kegiatan	5.359.024.100
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja DPRD yang Tersusun	Setwan	1 dokumen	1.118.024.000	APB D		1 dokumen	1.200.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Banmus yang Terfasilitasi	Setwan	48 kegiatan	1.800.000.000	APB D		48 kegiatan	2.000.000.000
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Terfasilitasi	Setwan	48 kegiatan	2.709.972.000	APB D		48 kegiatan	3.000.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya caapaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kab. Mojokerto yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia”**, ditempuh melalui lima misi dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto melaksanakan misi ke 3 (tiga) yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”** dengan tujuan RPJMD. Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 yang akan dilaksanakan melalui program – program Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

Program Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 merupakan deskripsi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten kota yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tidak mempunyai penelaahan usulan program dan kegiatan yang mendukung Program Tahun 2022 dimaksud dikarenakan tidak adanya keterkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD adalah OPD penunjang yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan uraian kegiatan Prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan pada Tabel Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

TABEL 4.1
REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022
SESUAI RANCANGAN RENJA 2022

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		APBN		
					OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET			SKPD Terkait	PAGU (Rp)	K/L	R/p	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					Nilai SAKIP	76,18 (BB)	SET WAN	49.619.273.607					
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun		6 dokumen	SET WAN	30.000.000					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Tersusun			2 dokumen	SET WAN	15.000.000					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Evaluasi			4 dokumen	SET WAN	15.000.000					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Presentase realisasi anggaran perangkat daerah		90%	SET WAN	4.291.067.815					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN			14 bulan	SET WAN	4.291.067.815					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				IP ASN		80	SET WAN	700.000.000					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Pakaian			30 stel	SET WAN	100.000.000					

				Dinas Pegawai yang Terpenuhi										
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Workshop ASDEKSI yang Diikuti ASN sesuai Tupoksi			7 kegiatan	SET WAN	600.000.000					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		80%	SET WAN	3.309.664.000					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5 paket	SET WAN	2.000.000.000					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket pengadaan Alat Tulis Kantor			1 paket	SET WAN	99.664.000					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan			1 paket	SET WAN	200.000.000					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Paket Pengadaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			1 paket	SET WAN	10.000.000					
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah waktu Fasilitasi kunjungan tamu			12 bulan	SET WAN	600.000.000					

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Waktu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah		12 bulan	SET WAN	400.000.000					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan		100 %	SET WAN	2.500.000.000					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik		12 bulan	SET WAN	600.000.000					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik		12 bulan	SET WAN	1.900.000.000					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik		100 %	SET WAN	1.358.000.000					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan		24 unit	SET WAN	600.000.000					

					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Waktu Pemeliharaan n Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik (Penyediaan Jasa kebersihan Kantor) dan Peralatan Kerja yang Terpelihara			12 bulan	SET WAN	358.000.000					
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Waktu Pemeliharaan n Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik			12 bulan	SET WAN	400.000.000					
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		14 bulan	SET WAN	14 bulan, 150 stel, 50 org					
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			14 bulan	SET WAN	35.845.541.792					
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Jumlah Pakaian Dinas sesuai Ketentuan yang Tersedia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD			150 stel	SET WAN	400.000.000					

		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapat Pelayanan General Check Up		50 orang	SET WAN	185.000.000					
		Layanan Administrasi DPRD				Jumlah Waktu Layanan Administrasi DPRD	12 bln	SET WAN	1.000.000.000					
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			Jumlah Waktu Fasilitasi Rapat DPRD		12 bulan	SET WAN	1.000.000.000					
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					10 dokumen	SET WAN	40.405.630.000					
						Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	60%	SET WAN	7.220.272.000					
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	10 dokumen	SET WAN	7.220.272.000					
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Jumlah dokumen Program Rancangan		2 dokumen	SET WAN	900.000.000					

				Perda yang Dibahas											
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen Raperda yang Dibahas			4 dokumen	SET WAN	4.000.000.000						
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik		Jumlah dokumen Naskah Akademik yang Disusun			4 dokumen	SET WAN	2.320.272.000						
				Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi			90%	SET WAN	5.838.788.000						
		Pembahasan Kebijakan Anggaran			Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran dibahas		6 dokumen	SET WAN	5.838.788.000						
		Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang dibahas			1 dokumen	SET WAN	1.118.408.000						
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang dibahas			1 dokumen	SET WAN	1.118.024.000						
		Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen APBD yang Dibahas			1 dokumen	SET WAN	1.118.408.000						
		Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang Dibahas			1 dokumen	SET WAN	1.118.024.000						
		Pembahasan Laporan Semester		Jumlah			1	SET	247.900.000						

					dokumen Laporan APBD yang Dibahas per Semester			doku men	WAN						
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			Jumlah dokumen Pertanggung jawaban APBD yang Dibahas			1 doku men	SET WAN	1.118.024.000					
							Persentas e Pelaksana an tugas dan fungsi Pengawas an Penyelen ggaran Pemerint ahan yang terfasilita si	80%	SET WAN	8.168.024.000					
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				Jumlah Pengawas an Penyeleng garaan Pemerinta han terfasilitas i		288 kegiat an/ 2 doku men	SET WAN	8.168.024.000					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum			Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintah an dan Produk Hukum yang Diawasi			48 kegiat an	SET WAN	1.500.000.000					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			Jumlah Kegiatan Urusan Bidang Infrastruktur yang Diawasi			48 kegiat an	SET WAN	800.000.000					

		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diawasi			48 kegiatan	SET WAN	1.500.000.000					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang Diawasi			48 kegiatan	SET WAN	750.000.000					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang Diawasi			48 kegiatan	SET WAN	800.000.000					
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			Jumlah dokumen Temuan BPK dan Rekomendasi BPK yang Diawasi			1 dokumen	SET WAN	400.000.000					
		Pengawasan Penggunaan Anggaran			Jumlah Kegiatan atau Proyek APBD yang Diawasi			48 kegiatan	SET WAN	1.300.000.000					
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			Jumlah Laporan LKPJ yang Dibahas			1 dokumen	SET WAN	1.118.024.000					
						Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai	90%		SET WAN	19.178.546.000					

						Peraturan									
		Peningkatan Kapasitas DPRD				Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi		6 keg, 12 bln, 10 pakar, 70 tenaga ahli, 1 dokumen	SET WAN	5.175.000.000					
		Bimbingan Teknis DPRD			Jumlah Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD yang Dilaksanakan			6 kegiatan	SET WAN	3.000.000.000					
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan			Jumlah Waktu Publikasi dan Dokumentasi yang Diterbitkan			12 bulan	SET WAN	700.000.000					
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Disediakan			10 Orang	SET WAN	100.000.000					
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang Disediakan			70 orang	SET WAN	175.000.000					
		Penyusunan Program Kerja DPRD			Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang Disusun			1 dokumen	SET WAN	1.200.000.000					
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				Jumlah kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan		1 dokumen, 3 kegiatan	SET WAN	.720.750.000					

					Aspirasi Masyarakat terfasilitasi										
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang tersusun			1 dokumen	SET WAN	50.000.000					
		Pelaksanaan Reses			Jumlah kegiatan reses terseda			3 kegiatan	SET WAN	2.670.750.000					
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi		48 kegiatan	SET WAN	654.800.000					
		Pengawasan Kode Etik DPRD			Jumlah pengawasan Kode Etik DPRD			48 Kegiatan	SET WAN	654.800.000					
		Fasilitasi Tugas DPRD				Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi		144 keg, 1 dokumen	SET WAN	10.627.996.000					
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD terfasilitasi			48 Kegiatan	SET WAN	5.000.000.000					
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			Jumlah dokumen Laporan Kinerja DPRD yang Tersusun			1 dokumen	SET WAN	1.118.024.000					

		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			Jumlah Pelaksanaan Tugas Banmus yang Terasilitasi			48 kegiatan	SET WAN	1.800.000.000					
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Terasilitasi			48 kegiatan	SET WAN	2.709.972.000					

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini merupakan serangkaian kerangka kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai tujuan dan sasaran Renstra SKPD yang terbagi dalam 2 Program, 15 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. Salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pejabat/Staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik dan terarah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dengan disusunnya Rancangan Awal Renja Tahun 2022 yang selanjutnya ditetapkan Renja Tahun 2022 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO**

MARDIASIH, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP.196404051997032002